

GELOMBANG REVOLUSI DAN TRANSISI POLITIK DI TIMUR TENGAH DAN AFRIKA UTARA*

Khamami Zada¹

Permalink: <https://www.academia.edu/15117155>

Abstract: *Revolutionary Waves and Political Transition in Middle East and North Africa.* Political transition in Tunisia has greatly influenced to neighboring countries, especially Egypt. Libya and Yemen have been disturbed by the government's opposition. Political transition in Middle East is a fruit of authoritarian in which has been taking place since years ago. In addition, the high level of poverty gives effect to the transition process. Political transition in Tunisia and Egypt was happened in a peaceful way, marked by the resignation of Zain al-Din Ben Ali and Husni Mubarak. On the other hand, the armed conflict has been occurred in Libya and Yaman, heading the government's loyalties and the opposition groups. After the fall of Ben Ali and Husni Mubarak, it exist the struggle between radical groups and liberal ones in competing optical power.

Key Words: political transition, revolution, Islamism, radicalism and liberalism

Abstrak: *Gelombang Revolusi dan Transisi Politik di Timur Tengah dan Afrika Utara.* Efek domino transisi politik di Tunisia menjalar ke negara-negara tetangganya, terutama Mesir. Libya dan Yaman pun sedang menghadapi tuntutan mundur dari kelompok oposisi. Transisi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan akibat dari otoritarianisme yang berlangsung lama dan tingginya kemiskinan. Transisi politik yang terjadi di Tunisia dan Mesir berlangsung dengan pola damai dengan mundurnya Zain al-Din Ben Ali dan Hosni Mubarak. Di tempat lain, Libya dan Yaman juga berlangsung konflik bersenjata antara kelompok yang setia terhadap pemerintah dan kelompok oposisi. Paska Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir terjadi pertarungan antara kelompok Islamisme, radikalisme dan liberalisme dalam memperebutkan sumber politik kekuasaan dan kultural.

Kata Kunci: transisi politik, revolusi, Islamisme, radikalisme, liberalisme

* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Januari 2015, direvisi: 22 Maret 2015, disetujui untuk terbit: 29 April 2015.

¹ Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Jakarta Selatan. Email:

Pendahuluan

Jatuhnya rezim Zain al-Din ben Ali dari kursi kekuasaannya telah membawa gelombang perubahan politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara-negara yang telah lama dipimpin rezim otoriter, seperti Mesir, Libya, Yaman, Jordania, Suriah, Maroko dan kawasan lainnya mengalami pergolakan yang luar biasa. Efek domino kejatuhan Ben Ali di Tunisia telah menginspirasi gerakan rakyat untuk melakukan perubahan rezim. Sesuatu yang tidak terduga sebelumnya bagi masyarakat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, mereka dapat menjatuhkan rezim penguasa yang begitu kuat. Rezim yang selama ini “tak tersentuh” oleh kekuatan oposisi tiba-tiba jatuh oleh gerakan rakyat massif yang menuntut mundurnya sang rezim.

Tunisia dan Mesir merupakan negara-negara yang paling jelas sedang mengalami transisi politik setelah gerakan revolusioner menumbangkan rezim penguasa. Tunisia menjadi awal spektrum gelombang revolusi yang mempengaruhi lanskap politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ben Ali harus menerima kenyataan mundur dari kekuasaannya yang telah digenggamnya selama tiga dekade. Mesir pun ikut bergejolak. Rakyat Mesir melakukan gerakan massa untuk menjatuhkan rezim Hosni Mubarak. Berikutnya giliran Libya dan Yaman yang terkena efek revolusi Tunisia. Gerakan rakyat menjatuhkan rezim Muammar Khadafi dilakukan, meski Khadafi sendiri menolak mengundurkan diri. Ali Abdullah Saleh harus menerima kenyataan muncul pergerakan rakyat menuntut mundur dari singgasana kekuasaannya.

Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan kawasan yang geopolitiknya dipengaruhi oleh konstelasi politik di daerah sekitarnya. Geopolitik di kawasan ini sesungguhnya terpusat pada tiga kekuatan utama: Arab Saudi, Mesir dan Iran. Arab Saudi dan Mesir mewakili negara Suni yang sejak kejatuhan Khilafah Turki Utsmani 1924 hendak mengambil alih pengaruh hegemoninya di Timur Tengah. Sedangkan Iran mewakili negara Syiah yang sedang memainkan peranan penting dalam geopolitik di Timur Tengah dalam melawan hegemoni Barat.

Geopolitik di kawasan ini sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh Islam sebagai agama yang melekat dalam konstelasi politik nasional. Islam menjadi faktor yang penting dalam membingkai konstelasi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejarah kawasan ini tidak bisa dielakkan dari berkembangnya Islam dalam pentas politik internasional semenjak masa al-Khulafa al-Rasyidun hingga Kekhalifahan Abbasiyah di Bagdad. Bernard Lewis menyebut kejayaan Abbasiyah telah diakui

oleh sejarahwan Muslim dan Barat.² Masa keemasan Islam di Timur Tengah (Madinah, Damaskus, dan Bagdad) dan tersebarnya dinasti-dinasti Islam (Mesir, Maroko, Tunisia) menjadi *entry point* dalam membaca peta politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Tidak mengherankan jika gelombang revolusi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara sekarang ini sangat terkait dengan sejarah pergolakan Islam di masa lalu.

Gerakan revolusi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara sekarang ini merupakan revolusi lanjutan dari Revolusi Islam Iran, 1979 ketika berhasil menumbangkan rezim penguasa Shah Pahlevi yang otoriter dan *diback up* oleh Amerika Serikat. Meskipun dalam skala perubahan yang berbeda, tetapi Revolusi Islam Iran masih menjadi memori dalam melakukan perubahan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara-negara di Timur Tengah dengan keragaman bentuk negaranya pernah memperdebatkan pengaruh Revolusi Islam Iran, 1979.

Pengaruh Revolusi Islam Iran, 1979

Ide kebangkitan Islam menyeruak ke dalam diskursus intelektualisme Islam begitu bergelora ketika terjadi revolusi Islam Iran, 1979. Revolusi Islam Iran yang dipimpin Imam Khoemaii telah berhasil mengguling rezim Reza Pahlevi yang didukung oleh Amerika Serikat sekaligus mengubah kebijakan Amerika Serikat di teluk Persia. Saat itu, negara, tentara, kekuatan keamanan dalam negeri terpecah, ekonomi kolap, dan organisasi-organisasi dari haluan politik kiri dan kanan berkontestasi meraih kekuasaan. Situasi ini sering digambarkan sebagai benar-benar dalam situasi revolusi (*chaos*) dan ada pertarungan antara kekuatan sekular dan agama. Konflik utama dari situasi ini adalah mau dibawa kemana masa depan masyarakat Iran, di bawah kendali teokrasi Islam atau pembaharu moderat.

Saat itu, Imam Khoemaii memaksa Perdana Menteri Bakhtiar untuk mundur dari jabatannya dan dia menunjuk Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri untuk menata administrasi pemerintahan dan stabilitas ekonomi. Khoemaii lalu membentuk *Islamic Republic Party* (IRP) untuk menjaga Ideologi Revolusi Islam. Partai ini mendapat dukungan dari ulama, masyarakat urban dan masyarakat rural. Pada Maret 1979, diadakan referendum nasional yang menyetujui pergantian dari monarkhi ke Republik Islam. Iran menjadi Negara Islam yang berbentuk Republik.

² Bernard Lewis, *The Middle East, A Brief History of the Last 2,000 Years*, (New York: Scribner, 1995), h. 75.

Transisi politik yang terjadi di Iran dikendalikan oleh Khoemaini sebagai pemimpin revolusi. Tidak mengherankan jika praktik politik yang diperkenalkan di Iran adalah perpaduan antara konsep politik Syiah Itsna Asyariah dengan demokrasi modern. Meskipun di Iran, ada Presiden yang mengurus Negara dan Perdana Menteri yang mengurus pemerintahan, tetapi ada mekanisme politik yang disebut Wilayahul Faqih yang memiliki kewenangan untuk memveto keputusan Presiden. Konsep Wilayahul Faqih ini diambil Khoemaini dari konsep politik Syiah yang disebut *al-Ghaibatul Kubra* (kegaiban besar), yaitu suatu masa ketika Imam Keduabelas menghilang dan diyakini oleh orang-orang Syiah akan datang kembali di hari akhir sebagai Imam Mahdi. Dalam pandangan Khoemaini, pada zaman sekarang ini Imam Keduabelas diwakili oleh faqih yang diyakini memiliki kemampuan dalam bidang agama dan politik.

Namun demikian, Iran diisolasi di kawasan Timur Tengah dan komunitas internasional pada 1980-an. Statemen Khoemaini bahwa tujuan dari Revolusi Islam Iran untuk mendirikan Negara Islam universal telah memberi sinyal peringatan bagi pemimpin negara-negara Arab. Bukan hanya itu, Iran sering dituduh mensupport kelompok radikal Syiah di Lebanon.³ Pemimpin Negara-negara Arab khawatir pengaruh Iran terhadap rezim kekuasaan yang sedang digenggamnya. Gelombang revolusi tidak ingin terjadi di Negara-negara Arab lainnya sehingga perubahan politik di Iran tidak mendapatkan tempat bagi pemimpin negara-negara Arab.

Meskipun Iran diperlakukan negatif oleh pemimpin negara-negara Arab, tetapi pengaruh Revolusi Islam Iran meluas ke seluruh dunia Islam. William L. Cleveland (1994) menyebut Revolusi Islam Iran memiliki pengaruh yang signifikan tidak hanya bagi Iran, tetapi juga Timur Tengah secara keseluruhan, dan juga negara-negara Islam di seluruh dunia. Sukses Revolusi Islam Iran mendorong Muslim di mana pun untuk bangkit melakukan perubahan.⁴ Selama 1970-an dan 1980-an, Negara-negara Islam di Timur Tengah mengalami tuntutan untuk mengembalikan Islam ke peranan yang sentral dalam kehidupan politik dan sosial.

Anderson, Seibert dan Wagner dalam *Politics and Change in the Middle East: Source of Conflict and Accomodation* menyebut Revolusi Islam Iran merupakan bukti bahwa rakyat Timur Tengah mampu mengatur politik domestik dan internasional dengan caranya sendiri.

³ William L. Cleveland, *A History of Modern Middle East (Oxford: Westview Press, 1994)*, h. 418-419.

⁴ William L. Cleveland, *A History of Modern Middle East*, h. 398.

Pengaruh perubahan politik di Iran menyebar ke gerakan politik fundamentalis di Jordania, Mesir, Sudan, Aljazair dan Maroko.⁵

John L. Esposito pernah melukiskan perubahan ini di beberapa negara Islam, "Tiba-tiba saja para ahli (baik yang di perguruan tinggi maupun yang di pemerintahan) dan juga media massa tersentak oleh adanya suatu gejala yang diberi nama bermacam-macam, seperti "kebangkitan Islam", "Islam militan", atau "kebangunan Islam". Revolusi Iran, pendudukan Masjidil Haram di Mekah, usaha untuk memperkenalkan sistem Islam (*nizham al-Islam*) di Pakistan, dan juga laporan dari banyak negara Islam mengenai semakin dilaksanakannya ajaran-ajaran Islam (kehadiran di Masjid, busana muslim, berpuasa di bulan Ramadhan, dan lain-lain) telah memperkuat dugaan bahwa Islam telah tampil kembali dan menjadi faktor penting dalam perubahan politik dan sosial dalam bentuk yang sukar untuk dijelaskan".⁶

Di Indonesia sendiri, Revolusi Islam Iran telah menyadarkan bahwa Islam memiliki kekuatan untuk bangkit melawan rezim. Presiden Soeharto yang pada awalnya melakukan marjinalisasi politik Islam mulai merubah gaya politiknya. Tahun 1980-an, rezim Soeharto mengubah haluan politiknya lebih akomodatif terhadap Islam.⁷ Kesadaran tentang kebangkitan Islam di Indonesia ditangkap oleh Soeharto dengan politik akomodatifnya terhadap Islam, seperti: (1) Disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989; (2) Diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; (3) Diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991; (4) Dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan badan amil zakat, infak dan shadaqah (Bazis) tahun 1991; dan (5) Dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993, berdirinya Bank Muamalat tahun 1991, didirikannya ICMI tahun 1991 dan lain sebagainya.

Revolusi Islam Iran, di satu sisi membawa kekhawatiran bagi rezim penguasa terutama dalam menghadapi gelombang reformasi, dan di sisi lain, membawa daya dorong bagi gerakan perubahan dari kelompok-kelompok Islam. Namun, yang terjadi di tahun-tahun 1980-an

⁵ Roy R. Anderson, Robert F. Seibert dan Jon G. Wagner, *Politics and Change in the Middle East: Source of Conflict and Accomodation*, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004), 273-274.

⁶ Lihat John L. Esposito (ed), "Pendahuluan" dalam *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*, Penerjemah: A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 3-4.

⁷ Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 273.

Khamami Zada

adalah hanya sebatas perubahan politik yang tidak signifikan. Para rezim masih tetap berkuasa dan gelombang gerakan rakyat tidak terkonsolidasi dengan baik. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin hanya mampu beraliansi dengan kelompok-kelompok politik lainnya, seperti Partai Wafu, Partai Buruh, dan Partai Liberal. Di Indonesia, kelompok-kelompok Islam justru terkooptasi terhadap gaya politik Soeharto yang mulai lebih akomodatif terhadap Islam.

Revolusi, Kemiskinan dan Otoritarianisme

Revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara dipicu oleh seorang sarjana tukang Sayur, Bouazizi, 26 tahun. Sekarang, ia terkenal di seluruh Tunisia dan dunia Arab. Muhammad Bouazizi adalah pemuda tertindas di wilayah Sidi Bouzid Sidi. Banyak dari mereka punya gelar sarjana, namun menghabiskan hari-hari mereka berkeliaran di kafe-kafe yang melapisi jalan-jalan berdebu di kota miskin ini, 300 kilometer sebelah selatan ibu kota Tunis. Awalnya, pada tanggal 17 Desember 2010 mata pencahariannya terancam ketika polisi menyita gerobak sayur dan barangnya karena ia berjualan tanpa izin. Tidak puas dengan menerima denda 10 dinar Tunisia, ia mencoba untuk membayar sekitar 7 dolar (setara dengan penghasilannya sehari jika lagi beruntung). Polisi diduga menampar pemuda kurus ini, meludah di wajahnya dan menghina ayahnya yang telah meninggal. Dihina dan merasa kesal, Bouazizi, yang mencari nafkah untuk keluarganya yang berjumlah delapan orang, pergi ke pejabat pemerintah daerah setempat, tapi sayang mereka menolak untuk bertemu dengannya.⁸

Pada pukul 11: 30, kurang dari satu jam setelah konfrontasi dengan polisi dan tanpa memberitahu keluarganya, Bouazizi kembali ke gedung putih menuangkan bahan bakar di atas dirinya sendiri dan membakar diri. Dia tidak langsung mati namun sempat menjalani perawatan di rumah sakit hingga 4 Januari 2010. Ada begitu banyak kemarahan atas penderitaannya bahkan Presiden Zain El Abidin Ben Ali, sang diktator, sempat mengunjungi Bouazizi pada 28 Desember 2010 untuk mencoba meredam kemarahan rakyat. Tapi protes tidak dapat ditekan dan pada 14 Januari 2011, hanya 10 hari setelah Bouazizi meninggal, pemerintahan 23 tahun Ben Ali di Tunisia telah berakhir.⁹

Tewasnya Bouazizi sebagai martir sesungguhnya memperlihatkan fenomena kemiskinan yang begitu akut yang

⁸ Aljazeera.com "Bouazizi, Sarjana Muda Tukang Sayur Pemicu Revolusi Tunisia"Jumat, 21/01/2011 15:34 diakses 25 April 2011.

⁹ Aljazeera.com "Bouazizi, Sarjana Muda Tukang Sayur Pemicu Revolusi Tunisia"Jumat, 21/01/2011 15:34 diakses 25 April 2011.

diperparah dengan gaya politik otoriter Ben Ali. Harapan kesejahteraan rakyat Tunisia tidak kunjung terwujud selama dipimpin Ben Ali. Kemsikinan itulah yang menggerakkan kesadaran rakyat Tunisia untuk melakukan perubahan politik. Tak mengherankan jika pecah revolusi di Tunisia, yang pada gilirannya menjadi efek dominasi bagi kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amir Moussa sebenarnya pernah memperingatkan para pemimpin negara Arab bahwa mereka berisiko menghadapi revolusi yang sama seperti di Tunisia yang menyebabkan Presiden Tunisia, Ben Ali, terguling. Dia mengatakan kemarahan rakyat di Timur Tengah sudah mencapai puncaknya akibat kemiskinan, pengangguran dan resesi dalam pidato membuka konferensi tingkat tinggi Liga Arab di Sharm El -sheikh, Mesir (19 Januari 2011).

Terbukti, tidak lama setelah lengsernya Ben Ali, terjadi pergolakan di Mesir menuntut pengunduran diri Hosni Mubarak. Ribuan orang turun ke jalan pada hari Selasa di Kairo. Setelah berkumpul dan berorasi di Tahrir Square, massa menyebar ke jalan-jalan kota. Unjuk rasa serupa juga terjadi di kota Ismailia dan Suez di timur Kairo, juga di Delta Nil seperti Mansoura dan Tanta, serta di Sinai utara, Alexandria. Aksi di Mesir hampir serupa dengan di Tunisia, yang dipicu kematian penjual buah, setelah bakar diri, sebagai protes kepada polisi yang menyita jualannya. Aksi di Mesir dipicu oleh kematian pemuda miskin, Khaled Said, setelah dipukul sepasang polisi di Alexandria. Bentrokan antara pendukung pemerintah dengan demonstran juga terjadi, yang akhirnya berhasil menggulingkan Hosni Mubarak. Sang penguasa tak kuasa menahan gelombang demonstrasi. Kekuasaan yang telah ia genggam berpuluh-puluh tahun akhirnya jatuh juga. Nasib sama telah dialami Hosni Mubarak dan Mesir pun mengalami transisi politik.

Angin perubahan juga berembus kencang ke Libya. Gelombang demonstrasi untuk menggulingkan Moamar Khadafi terus berlangsung. Bahkan, genderang perang telah terjadi. Demonstran bersenjata yang dibantu pasukan koalisi bergerak menyerang pasukan yang masih setia terhadap Khadafi. Bahkan, serangan pasukan koalisi terhadap Libya telah memporak-porandakan Negara Libya. Korban materiil dan jiwa telah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Di negeri lainnya, puluhan ribu warga Yaman juga menggelar unjuk rasa di ibu kota Sana meminta Presiden Ali Abdullah Saleh, yang telah berkuasa dalam 30 tahun terakhir, mundur. Para pengunjuk rasa berkumpul di beberapa lokasi dan meneriakkan saatnya untuk perubahan.

Pola Transisi Politik

Gelombang demonstrasi di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah merupakan gejala sosial dan politik paling dramatis dalam tiga dekade terakhir di Timur Tengah dan Afrika Utara setelah Revolusi Islam Iran, 1979 dan telah mengakibatkan sejumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur negara.

Tunisia dan Mesir sebagai negara yang paling awal mengalami transisi politik menganut pola damai dengan mundurnya sang rezim. Setelah menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran, Ben Ali dan Mubarak akhirnya mundur dari tampuk kekuasaannya secara damai. Meskipun terjadi bentrokan antara massa pendukung pemerintah dan demonstran, tetapi Tunisia dan Mesir tidak sampai terjadi konflik bersenjata, yang menimbulkan banyak korban jiwa. Pola ini sejatinya pernah dialami Filipina dan Indonesia ketika Ferdinand Marcos dan Soeharto lengser dari kekuasaannya. Tapi yang terjadi setelah jatuhnya kekuasaan Ben Ali dan Mubarak, sejumlah dakwaan dihadapi oleh Ben Ali dan Mubarak. Keduanya dituntut atas penyelewengan negara, terutama korupsi.

Pola kedua adalah transisi politik yang terjadi dalam kondisi konflik dan perang saudara. Inilah yang terjadi di Libya dan Suriah, yang memperlihatkan dua pasukan bersenjata antara kelompok yang setia terhadap pemerintah dan kelompok oposisi yang didukung Barat. Akibat dari pola transisi inilah, korban jiwa banyak berjatuhan, kerusakan infrastruktur, ekonomi yang semakin ambruk, dan perang saudara tak terhindarkan. Tampaknya pola damai tidak ingin dilakukan oleh Moamar Khadafi dan Bashar as-Sadat karena tidak ingin bernasib sama seperti Ben Ali dan Mubarak yang telah kehilangan kekuasaan sekaligus diadili dengan setumpuk dakwaan.

Tapi apa sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan oleh negara-negara Arab?. Tentu saja, kedaulatan bangsa sedang terkoyak-koyak. Transisi politik di Timur Tengah dalam bentuk penggulingan rezim melalui serangan militer jika sang rezim tetap bertahan (dalam kasus Libya dan Suriah) telah menjadi pola baku yang dilakukan negara-negara Barat. Maka hasil yang didapat adalah hilangnya kedaulatan sebuah bangsa.

Pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris telah menjadi kolonialisme baru dalam wajah reformasi dan demokratisasi. Kolonialisme lama dalam bentuk serangan militer untuk eksploitasi sumberdaya alam dan manusia sudah tidak lagi dalam bentuknya yang kuno. Kolonialisme modern dibungkus dalam wajah membela rakyat sipil dari pembantaian rezim penguasa dengan jalan

serangan militer. Ibaratnya, “menghentikan pembantaian dengan pembantaian yang serupa”.

Irak dan Afghanistan sesungguhnya dapat menjadi pelajaran berharga. Jatuhnya rezim otoriter tidak lantas mengubah Irak dan Afghanistan ke dalam sosok negara yang berdaulat. Justru intervensi negara-negara Barat terhadap Irak dan Afghanistan telah menghancurkan kedaulatan bangsa dalam wajah reformasi politik. Lantas, apa yang sekarang ini mereka alami?. Konflik antar suku bangsa terus-menerus terjadi. Penggulingan rezim dengan serangan militer asing telah merusak sistem peradaban dan kemanusiaan suatu bangsa. Kejatuhan rezim melalui serangan militer pada masa klasik Islam di Bagdad telah menjadi pelajaran emas betapa kehancuran bangsa dibarengi dengan hancurnya peradaban.

Libya, pimpinan Khadafi yang berkuasa terlalu lama tengah menghadapi situasi sulit dalam mempertahankan keadaulatan. Gelombang demokratisasi di Tunisia dan Mesir telah mendorong negara-negara lainnya menghadapi tuntutan transisi politik. Namun sayangnya, arah transisi politik di Libya ditentukan oleh kekuatan militer asing, bukan rakyat Libya sendiri. Hasilnya dapat diduga, yakni ada kepentingan politik dalam dan luar negeri Barat dan kepentingan ekonomi. Tapi dua kepentingan ini tidaklah cukup. Kebudayaan dan peradaban sebagai identitas kedaulatan bangsa pun ikut dirampas. Pada gilirannya, bangsa Libya akan menurut dan mengekor dari kepentingan Barat, seperti halnya Irak dan Afghanistan. Inilah yang paling mengkhawatirkan dari pola pergantian rezim dari kekuatan asing.

Sedangkan di tempat lain, Yaman, Ali Abdullah Saleh berusaha mempertahankan kekuasaannya. Tak jauh beda dengan Libya, Yaman juga menghadapi perang antara pasukan yang setia terhadap pemerintah dan pasukan oposisi yang didukung Barat. Gelombang demokratisasi yang tidak mulus di Yaman telah menghancurkan bangsa Yaman karena mereka kemudian terlibat dalam konflik politik.

Riza Sihbudi berpendapat negara-negara Barat memiliki agenda terselubung dalam menghadapi perubahan yang tengah terjadi di Dunia Arab. Sihbudi membandingkan sikap negara-negara Barat terhadap negara-negara Eropa Timur 20 tahun yang lalu. Kelompok-kelompok oposisi di Eropa Timur yang umumnya menganut ideologi kapitalisme/liberal yang sangat pro-Barat, antithesis terhadap rezim-rezim mereka pada masa itu yang berpaham komunisme,

marxisme/sosialisme di Uni Sovyet, Jerman Timur, Yugoslavia, dan Cekoslovakia.¹

0

Kebangkitan Islam dan Transisi Politik

John L. Esposito dan John O. Voll pernah mengatakan bahwa kebangkitan agama dan demokratisasi merupakan dua fenomena paling penting dalam dasawarsa abad kedua puluh. Di berbagai wilayah di dunia, gerakan-gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang memperkuat pembentukan sistem politik yang lebih demokratis. Sementara di wilayah lain, kedua dinamika itu saling bertentangan. Di dunia Islam, isu-isu ini muncul ke permukaan secara istimewa disebabkan adanya kekuatan kebangkitan Islam dan menguatnya tuntutan terhadap partisipasi rakyat yang lebih besar dalam proses politik pada tahun-tahun belakangan ini. Para pemimpin pemerintahan dan politik di seluruh dunia Islam menanggapi keinginan rakyat ihwal partisipasi politik dan aktivitas keagamaan yang lebih luas. Para penguasa dihadapkan pada pilihan antara menindas atau memberi ruang bagi partisipasi rakyat yang lebih besar.

Resikonya jika salah mengambil pilihan, mereka sendiri dapat kehilangan kekuasaan, seperti yang dialami Shah Iran atau Front Pembebasan Nasional (FLN) Aljazair. Jika mereka tidak segera menyesuaikan diri dengan tuntutan semacam itu, mereka dapat terguling, namun jika menerapkan sistem politik yang terbuka, mereka menghadapi resiko kalah dalam pemilihan umum. Gerakan-gerakan Islam pun menghadapi pilihan pelik antara menyesuaikan diri atau melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap sistem yang ada. Semua kelompok, baik Islam maupun sekular, yang mengupayakan demokratisasi lebih luas mesti menentukan strategi paling efektif untuk mencapai tujuan mereka. Pilihan-pilihan itu melibatkan konflik kekuasaan karena antara rezim penguasa dan gerakan oposisi rakyat itu terjalin berbagai relasi yang sangat kompleks. Persaingan, kerjasama, dan pertentangan merupakan relasi yang paling menentukan kehidupan umat Islam dalam tahun-tahun pertama abad kelima belas dan tahun-tahun terakhir abad kedua puluh.¹

Kondisi yang telah digambarkan Esposito dan Voll terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tunisia adalah yang pertama kali mengalami revolusi akibat politik otortarianisme Ben Ali yang diperburuk dengan tingginya tingkat kemiskinan. Hosni Mubarak sudah

¹ Riza Sihbudi, "Barat dan Revolusi Arab" *Kompas*, 26 Maret 2011, h. 6

¹ John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim, Prolem dan Prospek* (Bandung: Mizan, 1999), h. 1-2.

merasakan pahitnya dijatuhkan oleh gerakan massa. Kini, dua negara ini sedang berada dalam transisi politik, yang diharapkan oleh Barat menjadi negara demokratis.

Transisi seperti dikemukakan Guillermo O'Donnel dan Philippe C. Schmitter (1983) padahal tidak otomatis menjadikan negara dan bangsa demokratis setelah menjatuhkan rezim otoriter. Di satu sisi, transisi dibatasi oleh proses perpecahan sebuah rezim otoriter, dan di sisi lain, pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner. Kemungkinan-kemungkinan ini membuktikan bahwa masa transisi adalah masa yang tidak menentu. Karena sudah menjadi ciri transisi bahwa selama masa itu, aturan main politik sama sekali tidak menentu. Tidak saja karena aturan main (*rule of the game*) tersebut bekerja dalam perubahan yang terus-menerus terjadi, tapi juga karena biasanya aturan tersebut dipertarungkan dengan sengit. Para pelaku politik tidak hanya berjuang untuk sekadar memuaskan kepentingan-kepentingan pribadi sesaat dan atau kepentingan orang lain yang mereka wakili, namun juga berjuang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang konfigurasinya dapat menentukan siapa yang mungkin akan menang atau kalah di masa mendatang. Sesungguhnya, peraturan-peraturan yang muncul akan sangat menentukan sumber-sumber mana yang secara sah boleh dikerahkan ke dalam arena politik serta pelaku-pelaku mana yang diperkenankan masuk.¹

2

Lebih jauh lagi, selama masa transisi, bila memang ada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang efektif, itu cenderung berada dalam genggaman pemerintahan otoriter. Secara longgar atau ketat –tergantung pada kasus dan taraf transisi—para penguasa ini berusaha mempertahankan kekuasaan sewenang-wenang untuk menentukan aturan-aturan dan hak-hak, yang dalam kondisi demokrasi yang mantap umumnya dilindungi secara bertanggung jawab oleh undang-undang dan berbagai lembaga independen. Sebuah tanda tipikal yang menandai dimulainya suatu masa transisi adalah ketika para penguasa otoriter, demi alasan-alasan apa pun, mulai memodifikasi

¹ Transisi adalah interval (selang waktu) antara satu rezim politik dan rezim yang lain. Lihat Guillermo O'Donnel dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Penerjemah: Nurul Agustina, (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 6-7.

peraturan-peraturan mereka sendiri sebagai jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu dan kelompok.¹

Tahapan transisi berlangsung dengan baik setelah adanya pemerintahan baru yang bekerja dengan legitimasi yang memadai. Di bawah pemerintahan inilah kemudian dilakukan penataan kembali seluruh perangkat yang menyokong sistem politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tahapan transisi ini, yang bisa dirampungkan adalah penataan kembali perangkat keras, berupa: (1) Pergantian pelaku, (2) Tumbuhnya institusi atau lembaga-lembaga baru, (3) Perubahan dan pergantian aturan, serta (4) Perubahan dan pergantian mekanisme kerja politik, ekonomi dan sosial. Sementara itu, perangkat lunak, yakni cara berpikir (paradigma), pola perilaku, tabiat, dan kebudayaan dalam masyarakat (baik elit maupun massa) sudah mulai ditata.¹

Di tengah transisi politik itulah, gerakan politik dari aliran apa pun biasanya akan muncul. Kelompok liberal, sosialis, dan Islam akan saling berebut kekuasaan. Indonesia telah menjadi contohnya. Munculnya partai-partai politik paska penggulingan rezim Soeharto diiringi oleh aliran-aliran yang beragam. Namun demikian, Islam akan memainkan peran yang signifikan dalam setiap transisi politik, karena negeri-negeri Muslim, seperti Tunisia dan Mesir memiliki akar sejarah dan ideologi dengan Islam. Hal ini pula yang pernah terjadi di Indonesia. Pemilu pertama setelah transisi politik merupakan bentuk kebangkitan Islam.

Kebangkitan politik Islam telah mewarnai dinamika politik nasional, terutama dengan banyaknya bermunculan partai Islam dan ormas Islam. Reformasi Mei 1998 telah mendatangkan liberalisasi dan relaksasi politik yang cukup besar. Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Di antara organisasi politik yang muncul itu ada partai-partai yang mempunyai *social origin* Islam. Sebagai kelanjutan dari asal usul sosial yang demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini tampak terutama dalam simbol dan asas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam.¹ Ada 11 partai yang berasas Islam lolos di Pemilu 1999, yaitu PUI (Partai Umat Islam), PKU (Partai Kebangkitan Umat), Partai Masyumi Baru, PPP, PSII (Partai

¹ Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi*, h. 7.

¹ Eep Saefullah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 2000), h.11.

¹ Bahtiar Effendy, "Fenomena Partai Islam", dalam Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 2001), h. 33.

Syarikat Islam), PSII 1905 (Partai Syarikat Islam 1905), Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi), PBB, PK, PNU (Partai Nahdlatul Ummat) dan PP (Partai Persatuan).¹

6

Tidak berlebihan, jika asumsi kebanyakan muncul atas fenomena ini adalah repetisi dari wacana politik yang pernah ada pada Pemilu 1955. Seperti terlihat dari penggunaan nama partai, asas dan simbol massif. Menyebut PBB, PUI, PPIM atau Masyumi Baru, tidak dapat dilepaskan dari partai Masyumi dan menyebut PKB, PNU, PKU, dan partai SUNI tidak dapat dielakkan dari partai NU. Begitu juga PSII dan PSII 1905 sebagai reinkarnasi dari PSII di Pemilu 1955.¹ Bahtiar Effendy memandang kemunculan parpol Islam merupakan reaksi logis dari sebuah tatanan politik yang monolitik, yang menafikan keragaman ciri dan aspirasi (seperti yang ditunjukkan dalam asas tunggal), serta euforia reformasi di pihak lain. Dengan itu, parpol Islam ingin menunjukkan bahwa mereka memerlukan otonomi relatif untuk menentukan sendiri asas dan simbol politik mereka.¹

Di Pemilu 1999, partai-partai Islam tidak mampu mendapatkan dukungan massa yang banyak. Hanya PPP yang meraih suara cukup signifikan dan masuk lima besar. PBB hanya menempatkan wakilnya di DPR dengan 13 anggota, PK hanya memetik 7 kursi, bahkan gagal memenuhi ketentuan perolehan minimal (*threshold*) dua persen dari suara total. Sedang partai-partai Islam lainnya, jeblok perolehan suaranya dalam Pemilu yang dibilang sangat demokratis. Padahal, partai nasionalis sekuler (PDI-P) berhasil meraih 153 kursi, meski sudah terpecah-pecah dengan berdirinya PNI Front Marhaen, PNI Massa Marhaen, PNI Supeni, Partai Nasional Demokrat (PND), dan PDI.

Pertarungan Islamisme, Radikalisme, dan Liberalisme

Dalam kasus Indonesia, semenjak kejatuhan Orde Baru, kelompok Islam radikal menemukan momentumnya untuk melakukan akselerasi politik

¹ Lihat Kuntowijoyo, "Peta Politik bagi Umat Islam" dalam *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alfabeta, 1999), h. 89.

¹ Jika partai Islam mantan kontestan Pemilu 1955 mengalami reinkarnasi, maka beberapa partai Islam, yang secara historis tidak mempunyai hubungan dengan Pemilu 1955, malah melakukan merger dalam wadah Partai Indonesia Baru (PIB). Tercatat, ada tiga partai yang berafiliasi ke dalamnya, yakni Partai Era Reformasi Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Amanah Masyarakat Madani (PAMM) dan Partai Kesatuan Umat Indonesia (PKUI). Lihat M. Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama dan Negara*. Laporan Penelitian Ford Foundation-Puslit UIN Jakarta, 2000, h. 17.

¹ Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama dan Negara*, h. 8- 9.

Khamami Zada

secara kultural (ormas Islam) dan struktural (partai Islam).¹ Dua gerakan ini menjadi penting ketika rezim yang berkuasa memberikan angin segar kebebasan setelah lama dipinggirkan secara politik oleh rezim Orde Baru. Di balik pesta pora demokrasi yang disuguhkan oleh masyarakat Indonesia pasca lengsernya Orde Baru, muncul fenomena lain yang tidak disadari sebelumnya. Jika masyarakat lebih tertuju pada maraknya partai-partai Islam, maka ini adalah sesuatu yang niscaya. Namun, kita terkagum-kagum dengan fenomena kelanjutannya, yakni maraknya gerakan Islam yang direpresentasikan oleh Islam radikal di Indonesia. Atribut, slogan, dan nama-nama Islam begitu ramai nampak dan diteriakan sebagai bagian dari pentas kekuatan dan pentas perjuangan.

Karena itu, trend Islam yang mengemuka di Indonesia kontemporer sejak lengsernya Orde Baru adalah lahirnya Islam radikal, yang diwakili sejumlah ormas Islam seperti Laskar Jihad (Forum Komunikasi Ahlunnahdhal Waljamaah), Hizbut Tahrir, Forum Pembela Islam (FPI), Ikhwanul Muslimin, dan Majelis Mujahidin menyusul ormas Islam sebelumnya seperti KISDI. Karakteristik kelompok ini lebih didasarkan pada corak keberagamaannya yang bersifat integralistik antara Islam dan negara, sehingga kelompok ini lebih mengedepankan corak legal-formal Islam secara total. Isu utama yang diperjuangkan adalah tegaknya syariat Islam di dalam negara Indonesia.

Kecenderungan inilah yang membuat sebagian pengamat terkejut ketika Islam radikal mengalami pertumbuhan yang cukup dahsyat di saat rezim Orde Baru lengser. Padahal, di era 1980-an, Islam Indonesia menunjukkan karakter yang moderat seperti yang sudah diteliti oleh sejumlah intelektual.² Maka potret gerakan Islam berubah total, setelah Islam substansialistik menjadi mayoritas diskursif, Islam radikal yang lebih legalistik-formalistik mulai menampakkan wajahnya.

Transisi politik di Tunisia dan Mesir paling tidak akan menghadapi gelombang Islamisme dan radikalisme, jika kebebasan politik dibuka lebar-lebar seperti Indonesia. Arus kebebasan pasca transisi di Tunisia dan Mesir akan menghadapi tarikan yang kuat antara Islamisme, radikalisme dan liberalisme, seperti pengalaman Indonesia. Pengaruh ideologi politik yang mengarah pada fundamentalisme,

¹ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: ISAI, 2001), h. 197.

² Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: ISAI, 2001), Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), dan Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1999.

seperti Ikhwanul Muslim², diasumsikan akan lebih menggema di Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama di Mesir, karena di sanalah Ikhwanul Muslimin lahir. Lebih-lebih, Ikhwanul Muslimin merupakan partai politik yang paling aktif dan dominan berhasil masuk ke Palestina pada 1946, lalu masuk ke Yordania. Bahkan Ikhwanul Muslimin pernah merasakan pemerintahan Yordania ketika Mazhhar Badran, tokoh terkemuka Ikhwanul Muslimin diminta Raja Hussein untuk menyusun kabinet pada Januari 1991.² Besarnya pengaruh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan dunia Arab, tidak dapat dipisahkan dari faktor kesamaan nasib dan tujuan untuk menyuarkan hak-hak umat Islam di tengah rong-rongan kolonialisme. Kesamaan kultural (budaya dan ras) bangsa Arab juga memperkokoh penerimaan negara-negara Arab di luar Mesir terhadap Ikhwanul Muslimin.²

Gerakan Islamisme Ikhwanul Muslimin di Mesir sejak 1980-an menggunakan pendekatan *bottom-up* dan gradual dalam melakukan perubahan politik dan bersedia berpartisipasi dalam sistem politik yang ada. Meskipun di era Mubarak, Ikhwanul Muslimin dilarang sebagai sebuah partai politik, Ikhwanul Muslimin membentuk koalisi dengan partai-partai politik lain dan tampil sebagai oposisi politik paling menentukan. Pada 1984, Ikhwan bergabung dengan Partai Wafu di Pemilu 1984 dengan memperoleh 65 kursi dari 450 kursi sehingga menjadi kelompok oposisi terbesar di Parlemen. Pada Pemilu 1987, Ikhwan berkoalisi bersama Partai Buruh dan Partai Liberal dalam Aliansi Islam dengan memenangkan 17 persen suara; Ikhwan memperoleh 38 dari 60 kursi aliansi.²

Dengan kekuatan politik dan kultural yang telah dibangun Ikhwanul Muslimin, transisi politik di Mesir paska Mubarak akan

² Sejarah kelahiran Ikhwanul Muslimin diawali di Islamiliyah¹ sebelah timur laut Kairo, Mesir pada Maret 1928. Sebagai organisasi massa keagamaan, Ikhwanul Muslimin merupakan induk sekaligus muara bagi lahirnya banyak organisasi Islam di Mesir dan beberapa negara Arab lainnya, termasuk di Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait, Yaman, dan sebagian negara Afrika Utara.

² Lima anggota Ikhwanul Muslimin memimpin departemen-departemen penting, antara lain, pendidikan, layanan sosial, dan kehakiman. Di antara reformasi yang dilakukan Menteri Pendidikan yang baru, Abdullah Al-'Aqaliya adalah pemisahan berdasarkan jender di tempat kerja dan sekolah, revisi buku teks, pengangkatan sejumlah anggota Ikhwanul Muslimin untuk menduduki posisi-posisi kunci dalam departemen tersebut dan dalam beberapa kasus pergantian beberapa wanita yang menduduki posisi strategis oleh pria.

² Khamami Zada dan Arif Arofah, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta: LSIP, 2003), h. 76.

² John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim, Prolem dan Prospek*, h. 243

Khamami Zada

semakin dihiasi oleh gerakan Ikhwan. Konsolidasi kelompok Ikhwan akan mewarnai Pemilu pertama paska revolusi Mesir. Namun demikian, gerakan radikal Islam di Mesir, seperti Syabab Muhammad, Takfir wa al-Hijrah, Jamaah al-Jihad, dan Jamaah Islamiyah yang sejak dulu berupaya menggulingkan pemerintahan dan menolak demokrasi, akan juga memanfaatkan momentum kebebasan politik.

Sedangkan di pihak lain, Barat menginginkan adanya liberalisme politik yang dibungkus dengan demokrasi. Melalui proyek pemikiran, Barat akan menyodorkan sejumlah *project* untuk pengembangan pemikiran yang dibungkus dalam ide demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Gelombang demokratisasi yang digelindingkan Barat akan direspon oleh para sarjana dan pemikir Muslim sebagai bagian dari transisi politik menuju demokrasi.

Tarik-menarik antara Islamisme, radikalisme dan liberalisme inilah yang akan terjadi di negeri-negeri Muslim (Tunisia dan Mesir) dalam transisi politik. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini akan sangat tergantung dari konsolidasi masing-masing kelompok dan faksi dalam merebut kekuasaan politik di pemerintahan, sekaligus perebutan sumber-sumber kultural, seperti ulama dan pendidikan Islam.

Pustaka Acuan

- Anderson, Roy R. Robert F. Seibert dan Jon G. Wagner, *Politics and Change in the Middle East: Source of Conflict and Accomodation*, (New Jesey: Pearson Prentice Hall, 2004).
- Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2001).
- Effendy, Bahtiar "Fenomena Partai Islam", dalam Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 2001).
- Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Esposito, John L. dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-negara Muslim, Prolem dan Prospek (Bandung: Mizan, 1999).
- Esposito (ed), L. "Pendahuluan" dalam Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik, Penerjemah: A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- Fatah, Eep Saefullah, Zaman Kesempatan: Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru, (Bandung: Mizan, 2000).
- Hefner, Robert W, Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: ISAI, 2001).

- Anwar, M. Syafi'i *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Kuntowijoyo, "Peta Politik bagi Umat Islam" dalam *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alvabet, 1999).
- Lewis, Bernard, *The Middle East, A Brief History of the Last 2,000 Years*, (New York: Scribner, 1995).
- L. Cleveland, William A *History of Modern Middle East* (Oxford: Westview Press, 1994).
- O'Donnel, Guillermo dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Penerjemah: Nurul Agustina, (Jakarta: LP3ES, 1993)
- Salim, M. Arskal, *Partai Islam dan Relasi Agama dan Negara. Laporan Penelitian Ford Foundation-Puslit UIN Jakarta*, 2000.
- Sihbudi, Riza "Barat dan Revolusi Arab" *Kompas*, 26 Maret 2011.
- Zada, Khamami dan Arif Arofah, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta: LSIP, 2003).

Khamami Zada